

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proyek merupakan serangkaian aktivitas untuk menghasilkan produk, layanan, atau hasil yang unik (Putra et al., 2019). Proyek bertujuan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan (Utama & Syairudin, 2020). Proyek konstruksi adalah kegiatan yang melibatkan pembuatan, perubahan, atau perbaikan objek-objek fisik seperti bangunan, jalan, jembatan, atau fasilitas lainnya.

Untuk melaksanakan proyek-proyek konstruksi tersebut, diperlukan manajemen proyek yang baik. Menurut Ervianto (2023) manajemen konstruksi (*construction management*) adalah bagaimana sumber daya yang terlibat dalam proyek konstruksi dapat diaplikasikan oleh manajer proyek secara tepat. Sumber daya dalam proyek konstruksi dapat dikelompokkan sebagai *manpower, materials, machines, money*, dan *method*.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam manajemen proyek adalah penggunaan produk dalam negeri. Produk dalam negeri adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh industri dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional. Penggunaan produk dalam negeri dapat diukur dengan besaran kandungan dalam negeri pada barang, jasa serta gabungan barang dan jasa. Besaran ini disebut dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Tingkat Kandungan atau Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disebut TKDN, adalah besarnya kandungan dalam negeri pada barang, jasa, dan gabungan barang dan jasa yang dinyatakan dalam persentase (Munawir, 2021a). TKDN merupakan salah satu indikator untuk mengukur keterlibatan industri dalam negeri

dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. TKDN juga merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh penyedia barang dan jasa dalam mengikuti proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengamanatkan adanya perhitungan nilai TKDN pada setiap dokumen penawaran. Perhitungan nilai TKDN dilakukan dengan menggunakan metode yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian sebagai kementerian yang diberikan mandat untuk mengatur TKDN.

Munawir (2021b) menyatakan bahwa penerapan program P3DN dinilai dapat memberikan ruang bagi produsen lokal dalam meningkatkan kapasitas produksi juga mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga mampu meningkatkan daya saing dipasar internasional. Sedangkan untuk mensubsitisi produk impor dalam pasar domestik P3DN juga menjadi proteksi lebih terhadap adanya potensi melemahnya nilai tukar. Untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri merujuk pada Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Presiden RI telah membuat tim khusus yang dinamai dengan Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, yang kemudian disebut Tim Nasional P3DN. Secara berkelanjutan pemerintah secara mendorong masyarakat untuk menggunakan produk-produk dalam negeri, dengan salah satu jargon “Aku Cinta Produk Indonesia”, tentunya hal tersebut dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satu hal yang ditujukan kepada masyarakat agar dipahami adalah terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Berdasarkan uraian penjelasan, maka penelitian ini bertujuan untuk menghitung dan menganalisis penerapan TKDN dalam manajemen proyek konstruksi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat penggunaan produk dalam negeri dalam proyek konstruksi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan saran untuk meningkatkan penerapan TKDN serta meningkatkan produk dalam negeri dalam proyek konstruksi di Indonesia.

Salah satu proyek konstruksi yang menarik untuk diteliti adalah proyek pembangunan Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kediri. Proyek ini merupakan salah satu proyek di bidang kesehatan yang ditargetkan selesai pada tahun 2024. Proyek ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp. 65 miliar dan luas bangunan sebesar $\pm 1198,6$ meter persegi. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Kediri dan sekitarnya. Oleh karena itu, perlu adanya analisis yang mendalam mengenai perhitungan nilai TKDN pada proyek pembangunan Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kediri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara perhitungan nilai TKDN pada proyek konstruksi?
2. Berapa nilai TKDN pada proyek proyek konstruksi?
3. Berapa nilai BMP perusahaan jasa kontraktor pada proyek konstruksi?
4. Berapa nilai penggabungan TKDN dan BMP pada proyek konstruksi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui cara perhitungan nilai TKDN pada proyek konstruksi.

2. Mengetahui nilai TKDN pada proyek konstruksi.
3. Mengetahui nilai BMP perusahaan jasa kontraktor pada proyek konstruksi.
4. Mengetahui nilai penggabungan TKDN dan BMP pada proyek konstruksi.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan metode perhitungan nilai TKDN yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri.
2. Penelitian ini hanya menghitung pekerjaan struktur tanpa melibatkan pekerjaan arsitektur dan *mechanical, electrical, plumbing* (MEP) pada proyek konstruksi.
3. Untuk perhitungan jasa atau tenaga kerja hanya menggunakan tenaga kerja lapangan tanpa melibatkan tenaga kerja manajerial.
4. Data yang digunakan adalah Spesifikasi Teknik, AHSP, Daftar harga satuan, dan RAB.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, antara lain:

1. Meningkatkan kemandirian dan keterlibatan industri dalam negeri dalam penyediaan bahan, tenaga kerja, dan alat yang digunakan untuk proyek konstruksi, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional.
2. Mengetahui tingkat kontribusi dan pemanfaatan sumber daya dalam negeri dalam proyek konstruksi, sehingga dapat mengukur kinerja dan dampak dari kebijakan pemerintah yang mendorong penggunaan TKDN dalam proyek

konstruksi, seperti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan dalam bidang konstruksi, seperti Kementerian PUPR, asosiasi kontraktor, dan lembaga penelitian, untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam mengembangkan dan menerapkan TKDN dalam proyek konstruksi.
4. Mendorong inovasi dan pengembangan teknologi konstruksi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dalam negeri, serta memenuhi standar kualitas dan keselamatan yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan proyek konstruksi.